

Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Umum (SMU)

Mudjahid AK

Kepala Puslitbang Pende dan Keagamaan

Latar Belakang

Hakikat Pendidikan bagi manusia adalah untuk memanusiakan manusia. Karena itu, tepat kiranya ungkapan yang mengatakan bahwa pendidikan adalah proses hominisasi dan humanisasi (Tilaar, 2000). Pendidikan sebagai proses hominisasi melihat manusia sebagai makhluk hidup dalam habitat ekologisnya. Dalam habitatnya manusia memerlukan kebutuhan-kebutuhan biologis seperti makan, minum, pekerjaan, sandang, tempat tinggal, berkeluarga, dan kebutuhan biologis lainnya. Dalam proses pendidikan manusia diarahkan agar dapat mengembangkan potensinya untuk memenuhi kebutuhan biologis ter-

sebut. Sementara itu, pendidikan sebagai proses humanisasi mengarahkan manusia untuk hidup sesuai dengan kaidah moral, karena manusia hakikatnya adalah makhluk yang bermoral. Moral manusia berkaitan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Karena itu, pendidikan seyogyanya tidak mereduksi proses pembelajarannya hanya semata-mata untuk kepentingan segi intelektual atau sebaliknya, namun di dalamnya perlu keseimbangan (*equilibrium*) dalam mengembangkan moral-intelektual.

Untuk itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam membentuk moral adalah pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Dengan tidak ada maksud untuk mengabaikan arti penting mata pelajaran, jenis, serta jenjang pendidikan lainnya, efektifitas pembelajaran PAI di SMU perlu dicermati secara seksama. Apalagi saat ini muncul dugaan dari sementara pihak yang menyatakan bahwa kegagalan pendidikan dalam membangun moral bangsa identik dengan kegagalan pendidikan agama. Terlepas dari benar tidaknya dugaan tersebut, pengkajian ulang mengenai penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum (SMU) perlu dilakukan dalam rangka menemukan model-model pengelolaan PAI di sekolah tertentu yang dinilai sudah berhasil mengembangkannya. Untuk itu, penting kiranya dilakukan kajian yang lebih spesifik dan mengarah pada upaya pencarian model-model pembelajaran PAI yang dirumuskan dalam studi mengenai "*Pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMU*".

Permasalahan

Mengacu pada tujuan pendidikan nasional, Pendidikan Agama sesungguhnya telah memperoleh tempat yang cukup layak dalam pembangunan karakter bangsa (*nation character building*). Hal itu tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yang meletakkan dasar-dasar pengembangan moral bangsa pada keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun kalau kita berbicara realitas pendidikan, tampaknya ada kekurangseimbangan antara wawasan ideal pendidikan dengan praktik pendidikan di sekolah. Wawasan ideal pendidikan agama yang lebih mengutamakan penanaman moral masih dihadapkan pada praktik pendidikan yang lebih banyak mengembangkan kemampuan nalar keagamaan. Karena itu, semangat keberagaman yang muncul dalam segala tindakan dan perilaku pendidik dan peserta didik perlu dikembangkan.

Untuk memecahkan masalah itu, permasalahan pendidikan moral dalam konteks Pendidikan Agama Islam perlu diidentifikasi pola-pola manajemen PAI yang bersifat kasuistik yang pada gilirannya dapat didesiminasikan kepada sekolah-sekolah lain yang memerlukan.

Tujuan

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan model pengembangan PAI di Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN). Adapun tujuan khusus penelitian ini diarahkan pada lingkup identifikasi mengenai:

1. Pengembangan PAI dalam kegiatan kurikuler. Lingkup anali-

sis ini difokuskan pada pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam proses belajar mengajar di kelas.

2. Pengembangan PAI dalam kegiatan ko-kurikuler. Lingkup analisis ini dipusatkan pada sejumlah kegiatan sekolah dalam mengembangkan PAI yang mendukung kegiatan kurikuler.
3. Pengembangan PAI sebagai budaya sekolah (*school culture*). Lingkup analisis ini lebih dipusatkan pada kebiasaan dalam bentuk ucapan, pikiran, tindakan, dan aturan yang dikembangkan oleh sekolah.
4. Faktor-faktor potensial yang mendukung pengembangan PAI secara bermakna, efektif dan efisien.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun di tingkat sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama. Karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai sejumlah inovasi Pendidikan Agama Islam yang kemudian dapat disebar-kan ke sekolah lain, khususnya sekolah yang berminat untuk mengembangkan model Pendidikan Agama Islam dengan cara mereplikasi model yang dipandang cocok dengan kondisi setempat.

Metodologi

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kasuistik yang berarti melakukan

penelitian dalam lingkup yang terbatas tetapi diharapkan menghasilkan produk kajian yang komprehensif. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif. Arti kualitatif di sini adalah penelitian dilakukan melalui penelusuran terhadap kenyataan-kenyataan empirik yang terjadi dalam pengembangan PAI di sekolah. Sifat penelitian ini juga melibatkan satu variabel mandiri (pengembangan PAI di sekolah) yang dikaji secara mendalam melalui sejumlah sub-variabel pendukung, tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain yang dianggap setara.

2. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) yang dinilai memiliki preferensi baik dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam. Penentuan SMUN dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan perbedaan geografis (propinsi). Oleh karena itu, meski penelitian ini bersifat kasuistik, dalam pelaksanaannya berusaha untuk memetakan sasaran yang agak luas yang meliputi tujuh SMUN yang berada di tujuh propinsi yang berbeda. SMUN yang menjadi sasaran penelitian ini adalah: (1) SMUN 3 Medan; (2) SMUN 2 Padang; (3) SMUN 3 Palembang; (4) SMUN 2 Bandung; (5) SMUN 1 Yogyakarta; (6) SMUN 5 Surabaya; dan (7) SMUN 1 Banjarmasin.

Teori-Teori Pendukung

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan penyelenggaraan pendidikan agama pada

semua strata pendidikan. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan agama yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik di masa mendatang, telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangannya. Pendidikan agama sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, pada intinya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan manusia, merubah perilaku, serta meningkatkan kualitas manusia menjadi lebih baik.

Salah satu upaya pendidikan agama yang dimaksudkan dalam Undang-undang tersebut adalah Pendidikan Agama Islam (PAI). PAI dapat diartikan dalam lingkup luas maupun sempit. Dalam arti luas, seperti halnya makna istilah pendidikan yang mencakup pengajaran dan bimbingan, PAI dapat pula diartikan sebagai keseluruhan proses pembelajaran (pengajaran dan bimbingan) yang memiliki kontribusi penting bagi perkembangan kepribadian beragama siswa. Dilihat dari lingkup pengertian ini, proses PAI dapat terjadi dalam proses pendidikan secara kurikuler, ko-kurikuler, maupun sebagai kultur sekolah, hal itu dapat pula terjadi dalam lingkup kurikulum tertulis (*written curriculum*), maupun kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Karena itu pula, dalam pemahaman seperti ini proses PAI sebenarnya tidak mudah dipisahkan secara kategoris berdasarkan unsur-unsur yang terpisah satu dengan lainnya dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Segala upaya pengelolaan pendidikan yang mem-

berikan bekal positif bagi kesadaran beragama, baik yang secara tegas memiliki label program keagamaan, maupun yang tidak, dalam konteks pengertian ini sebenarnya tidak mudah dikotak-kotakan melalui manajemen pendidikan. Namun, untuk mengidentifikasi yang meningkatkan peran dari setiap lini kekuatan pendidikan di sekolah, cara berpikir kategoris melalui sudut pandang manajemen pendidikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pengelolaan PAI dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengertian seperti diatas, maka sarana, prasarana, program, dan biaya pendidikan di sekolah perlu dikelola dengan baik dan benar.

Dalam pengertian yang lebih sempit, PAI dapat dipersepsi sebagai mata pelajaran yang dibedakan dari mata pelajaran lain seperti Matematika, Kimia, Fisika, Geografi, Bahasa Inggris, dll. Sama halnya seperti dalam lingkup pengertian yang lebih luas, PAI dalam pengertian ini secara substansial memiliki batas-batas kekaburan pada tingkat kontribusinya terhadap kesadaran beragama siswa. Adalah tidak mudah untuk dipastikan bahwa semua perilaku beragama siswa sebagai akibat dari proses pembelajaran mata pelajaran PAI di kelas. Demikian pula tidaklah mudah untuk dipastikan bahwa kontribusi mata pelajaran umum terhadap kesadaran beragama siswa sangat kecil. Karena itu, jika PAI dikaji sebagai sistem nilai yang terkandung dalam ikhtiar pendidikan, baik dalam lingkup luas maupun sempit, hal itu akan melibatkan berbagai kemung-

kinan terjadinya internalisasi nilai dari berbagai proses pendidikan. Secara manajerial, kemungkinan optimalisasi internalisasi nilai tersebut dapat diatur dengan cara mengelola komponen-komponen pendidikan dan pengajaran. Dalam konteks pengertian PAI sebagai mata pelajaran, pengelolaan dapat dilakukan dengan cara mengatur komponen-komponen pengajaran seperti tujuan, buku sumber, pendekatan, media, dan evaluasi.

Sebagai landasan teoretik penelitian ini, pengertian pengembangan PAI diarahkan pada pengertian yang lebih luas yang mencakup pengelolaan sejumlah komponen dan program bimbingan dan pengajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengalaman dan kesadaran beragama siswa. Untuk itu, berbagai faktor potensial yang diprediksi memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan kepribadian siswa seperti kurikulum, sarana, fasilitas, keuangan peran guru dan kepala sekolah, serta pola kerjasama menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

1. Profil umum

Secara umum, ciri khas SMU Negeri sebagai lembaga pendidikan formal cukup mewarnai proses pengelolaan Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai upaya pembiasaan dalam penegakan disiplin hidup yang ditekankan oleh sejumlah peraturan/ketentuan tertulis dan peraturan yang tidak tertulis (konvensi) antar warga sekolah. Peraturan tertulis yang menjadi rujukan pengembangan PAI di tiap sekolah

adalah rumusan visi, misi, strategi, tata-tertib, dan surat-surat keputusan kepala sekolah yang diturunkan dari sejumlah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan Nasional. Sementara itu, peraturan yang tidak tertulis tetapi telah menjadi kesepakatan bersama lahir dari rasa kesadaran beragama secara individual dan seringkali dikuatkan oleh adanya hubungan antar warga yang dijalin dalam forum-forum khusus seperti pengajian, rapat, penataran, atau ketika pengelolaan kegiatan kesiswaan.

Secara lebih spesifik, pengembangan Pendidikan Agama Islam di tujuh lokasi SMU Negeri menampilkan cara-cara yang unik sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya seperti input siswa, sumber daya guru, kepemimpinan kepala sekolah, kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan biaya, dukungan masyarakat, dan dukungan dari pihak pemerintah. Pada sekolah yang telah mengalami sejumlah kemajuan dalam pengelolaan Pendidikan Agama Islam seperti sekolah teladan atau percontohan, pengembangan manajemen PAI berawal dari inisiatif sekolah yang motori oleh kepala sekolah dalam membangun jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang kemudian mengundang perhatian secara khusus dari pemerintah pusat maupun daerah. Kepemimpinan kepala sekolah yang proaktif dalam menjemput berbagai kesempatan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pengembangan program-program PAI di sekolah.

2. Pengembangan Kegiatan Kurikuler

Peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada kegiatan kurikuler di kelas, secara umum kurang memiliki banyak perbedaan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Sebagai kegiatan pembelajaran yang dikelola secara formal dengan mengacu pada kurikulum pengajaran yang jelas, kegiatan ini lebih diarahkan pada peningkatan pengetahuan tentang agama Islam. Namun demikian ada beberapa hal yang penting untuk dicermati dari fenomena yang muncul seperti adanya upaya sekolah untuk menambah jam pelajaran agama dari 2 jam pelajaran menjadi 3 jam pelajaran, adanya upaya penyisipan pengetahuan secara integratif antara pengetahuan umum dengan nilai-nilai imtaq, dan adanya pembelajaran agama di kelas melalui pembiasaan etiket beragama, seperti mengucapkan salam, berdo'a, atau tadarus sebelum pelajaran dimulai.

Pada sekolah yang telah berhasil mengembangkan sejumlah kegiatan ko-kurikuler keagamaan dan kultur sekolah yang islamis, ternyata penambahan jam pelajaran untuk mata pelajaran PAI di kelas dan integrasi pembelajaran mata pelajaran umum dengan nilai-nilai imtaq dianggap tidak perlu lagi. Hal itu memiliki arti bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam yang paling penting dikembangkan adalah penciptaan latar (*setting*) pendidikan secara keseluruhan dalam berbagai aktivitas siswa, sehingga proses pembelajaran di kelas dapat diperkuat sekaligus tetap ditempatkan sebagaimana posisinya yang

lebih banyak memberikan pengetahuan keagamaan.

3. Pengembangan Kegiatan Ko-kurikuler

Perbedaan yang cukup unik sebenarnya terjadi pada pengelolaan pendidikan Agama Islam melalui kegiatan ko-kurikuler. Dalam kegiatan ini, terdapat sejumlah program yang tidak semuanya dimiliki oleh setiap sekolah yang menjadi sampel penelitian. Pada sekolah unggul seperti yang terjadi di SMUN 1 Teladan Yogyakarta dan SMUN 6 Palembang, kegiatan ko-kurikuler siswa dikelola dengan melibatkan sejumlah kegiatan dalam frekuensi dan intensitas yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan pengembangan PAI di sekolah lainnya. Pengembangan program PAI pada sekolah tersebut dilakukan secara seimbang dengan pengembangan program pendidikan lainnya. Sementara itu pada sekolah yang prestasi akademisnya tidak begitu berbeda dari sekolah negeri di wilayahnya, cenderung mengembangkan kegiatan ko-kurikuler keagamaan pada pola pengembangan yang biasa dengan intensitas kegiatan yang tidak terlalu mencolok.

Beberapa kegiatan ko-kurikuler yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesadaran beragama siswa adalah: Kegiatan Pesantren Kilat, Penyembelihan Hewan Qurban, Penyelenggaraan Shalat Sunat 'Ied di pelataran sekolah, Peringatan Hari Besar Islam, Forum Kajian Islam, Kegiatan Rohani Islam melalui Majelis Taklim, Program Baca-Tulis al-Qur'an, Menulis Kaligrafi, Belajar Puisi, Belajar Lagu Nasyid, Belajar Bahasa Arab, Pro-

gram Bakti Sosial, Kegiatan MTQ, Lomba Pidato dengan topik Keagamaan, Lomba Khutbah, Lomba Pengurusan Jenazah, Debat Pengetahuan Agama, Pelatihan Calon Da'i, Penerbitan Buletin Islam, Mengaktifkan Dewan Kesejahteraan Mesjid, Penambahan Jam Pelajaran Agama untuk Pengembangan Kepribadian, Seminar tentang Keberagaman Remaja, dll. Jenis kegiatan ko-kurikuler itu dikelola oleh siswa yang tergabung dalam wadah Rohani Islam (Rohis) bersama guru agama dan guru umum yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan PAI. Program-program tersebut dikembangkan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sumber dana untuk kegiatan tersebut diperoleh dari iuran siswa, kas OSIS, alokasi khusus anggaran sekolah dalam RAPBS yang dianggarkan untuk kegiatan siswa, dan yang paling besar berasal dari sumbangan masyarakat pengusaha, dan pemerintahan daerah.

4. Pengembangan Budaya Sekolah

Untuk pengelolaan PAI sebagai kultur sekolah, sebagian besar perilaku dan kebiasaan yang dikembangkan berjalan secara sukarela. Namun demikian, ada pula sekolah yang secara tegas membuat peraturan seperti dalam tata tertib sekolah. Hal-hal yang bersifat kultural yang dikembangkan di sekolah misalnya: 6 K (kerapihan, kebersihan, keindahan, kesopanan, ketertiban, dan keamanan), kebiasaan untuk melakukan shalat Jum'at di mesjid sekolah, Pembiasaan shalat sunat Dhuha, shalat berjamaah, tadarus, pengumandangan nasyid dan

bacaan al-Qur'an di saat akan masuk kelas, berdo'a di awal dan akhir jam pelajaran, berpakaian muslim (untuk sekolah tertentu ada diwajibkan pada hari Jum'at), penggunaan panggilan ikhwan/akhwat di antara siswa, kebiasaan mengucapkan salam, penggalangan infak siswa secara sukarela, penyediaan majalah dinding khusus untuk opini keislaman, berlangganan buletin Islam, pelibatan alumni dalam kegiatan keagamaan, pelibatan nara sumber ustadz dalam forum pengajian, sosialisasi profil keagamaan (hanya terjadi pada sekolah tertentu saja) melalui *website internet*, dan pemberian keleluasaan kepada siswa untuk mengelola kegiatan keagamaan. Kultur sekolah seperti itu, berlaku secara merata pada sekolah yang dijadikan lokasi penelitian, meski frekuensi dan intensitas pelaksanaannya cukup beragam.

Karena posisinya pengembangan PAI lebih banyak ditempatkan sebagai kegiatan ko-kurikuler, pengelolaan PAI ditempatkan secara semi otonom dari manajemen pendidikan SMU secara keseluruhan. Semi otonom berarti pengelolaan memperoleh dukungan penuh dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, tetapi dalam penyelenggaraannya bertumpu pada keterlibatan, insiatif, dan kreativitas siswa. Karena posisi demikian, kegiatan keagamaan tidak sepenuhnya didukung oleh keuangan yang disubsidi dari RAPBS, melainkan dari sumber-sumber keuangan lainnya seperti kas OSIS, kas Rohis, iuran peserta/siswa, sumbangan para donatur, dan sumbangan dari pemerintah daerah.

5. Faktor-Faktor Potensial dalam Pengembangan PAI

Pengembangan PAI di sekolah ditampilkan dengan kelengkapan secara fisik, khususnya dengan dibangunnya mesjid sekolah. Ukuran dan kenyamanan mesjid mencerminkan bahwa kegiatan keagamaan di sekolah dikelola dengan baik dan kepedulian warga sekolah dan masyarakat cukup besar terhadap pengembangan program-program keagamaan. Di tujuh lokasi SMU Negeri ini mesjid menjadi sentral kegiatan keagamaan siswa. Karena itu selain digunakan untuk kegiatan-kegiatan ritual keagamaan seperti shalat berjamaah, mesjid dijadikan pula sebagai tempat bimbingan baca tulis al-Qur'an, berdiskusi, dan mengelola organisasi DKM, dan belajar membiasakan memelihara kerapuhan kebersihan tempat ibadah.

Sarana lain yang digunakan sebagai sumber pengembangan PAI adalah perpustakaan sekolah dan perpustakaan mesjid. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kelengkapan buku bacaan yang bermuatan keagamaan masih kurang. Penambahan jumlah buku keagamaan lebih lambat jika dibandingkan dengan penambahan jumlah buku umum. Demikian pula kekayaan buku yang tersimpan di perpustakaan mesjid masih sangat terbatas. Hanya pada sekolah yang telah mampu membangun akses dengan para donatur jumlah judul buku keagamaan tampak cukup lengkap.

Keberhasilan dalam pengelolaan PAI di SMU berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan dan

tingkat religiusitas pribadi kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang mengembangkan kepemimpinannya dengan gaya yang demokratis cenderung lebih berhasil dalam mengembangkan pembelajaran PAI kepada sivitas sekolah. Cara ia mengambil keputusan yang melibatkan masukan dari guru, orangtua siswa, bahkan siswa telah mendorong sivitas sekolah untuk ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan sekolah dalam implementasi visi, misi, strategi dan program yang dicanangkan. Sebaliknya, kepemimpinan kepala sekolah yang otokratis yang terlalu berorientasi tugas tetapi kurang mampu mengembangkan hubungan yang harmonis antar warga sekolah cenderung membuat intensitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan kurang intensif. Demikian pula tingkat religiusitas kepala sekolah menjadi kekuatan lain bagi dirinya untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan PAI di sekolah agar lebih baik.

6. Model Dasar Pengembangan PAI

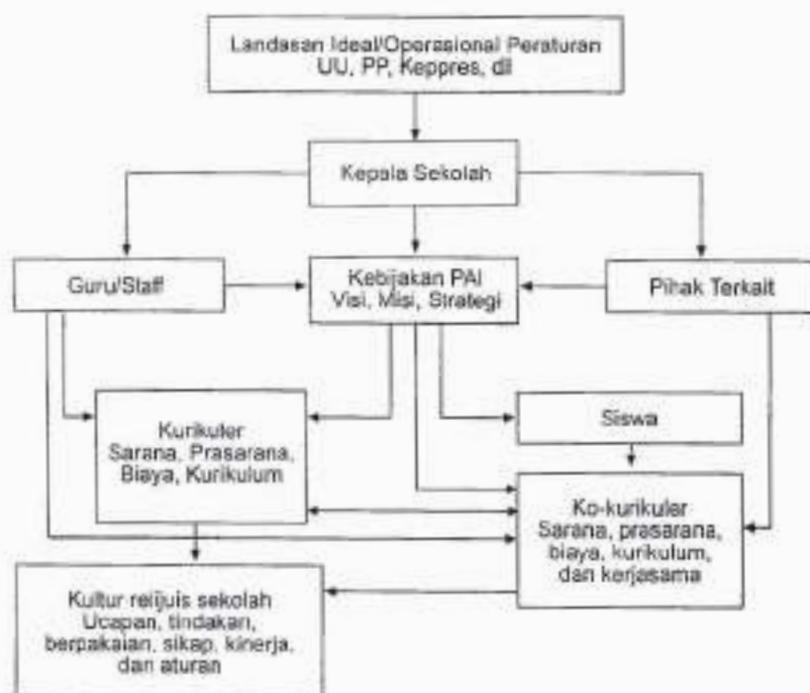
Pengembangan PAI di SMU dapat dirumuskan dalam sebuah model dasar yang diilustrasikan melalui sebuah bagan (lihat bagan). Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan umum selalu merujuk pada landasan atau acuan pengembangan Pendidikan Agama Islam. Landasan yang dimaksudkan antara lain: (1) GBHN dan UUSPN meletakkan keimanan dan ketaqwaan sebagai salah satu karakteristik kepribadian bangsa yang menjadi tujuan pendidikan nasional; (2) Pencanaan pesantren kilat nasio-

nal yang diresmikan presiden 14 Juni 1966 di Jakarta; (3) Surat edaran Mendagri nomor: 451.44/265 tanggal 21 Januari 1997 perihal pelaksanaan pesantren kilat; dan (4) SK Dirjen Dikdasmen no 511/C/Kep/MIN/2002 tentang penyelenggaraan program akselerasi yang mencantumkan perlunya kecerdasan emosional, sosial dan rohani dalam pembelajaran. Dari landasan ideal dan operasional tersebut dikembangkan sejumlah ketentuan sekolah seperti visi, misi, dan strategi sekolah yang mengandung kadar pembetulan karakteristik beragama siswa. Perumusan peraturan tersebut dibuat melalui musyawarah dengan guru, staf dan beberapa perwakilan dari orangtua siswa sebagai pihak terkait. Istilah-istilah seperti "berbudi pekerti luhur", "suasana religius", "bertaqwa", "berakhlak mulia", "unggul dalam iman", "suasana islami", atau "beriman dan bertaqwa" merupakan terminologi yang digunakan dalam visi sekolah sebagai rujukan pengembangan PAI.

Untuk kebijakan pengembangan pendidikan secara kurikuler, kepala sekolah langsung mengadakan pengawasan kepada guru dan terhadap ketersediaan kurikulum, biaya, dan sarana/prasarana. Hal itu dilakukan karena kegiatan kurikuler yang dipusatkan di kelas merupakan tanggung jawab siswa. Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat ko-kurikuler, sekolah mengembangkan kegiatan dengan memberikan kewenangan pengelolaan kepada siswa dan guru, meski dalam pengadaan sarana tempat ibadah kepala sekolah secara langsung memprakarsai pengadaan

sarana mesjid. Dalam pengelolaan kegiatan keagamaan secara ko-kurikuler, banyak masukan secara finansial maupun moril dari pihak-pihak terkait, termasuk dari para alumni SMU yang telah mencapai kesejahteraan hidup, sehingga kegiatan ko-kurikuler dapat berjalan

dengan baik. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dari penyelenggaraan program kegiatan ko-kurikuler adalah kepiawaian kepala sekolah dalam membentuk jaringan (*networking*) dengan para penyandang dana potensial.



Ketika dua kegiatan keagamaan (kurikuler dan ko-kurikuler) berhasil diselenggarakan, maka terjadi dampak positif bagi budaya sekolah yang religius. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa aktivitas sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan telah membentuk kultur sekolah yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai keagamaan. Hal yang tampak kepermukaan antara lain dapat dicirikan dari ucapan, perilaku, dan cara berpakaian yang secara langsung merujuk pada pengamalan nilai-nilai

Islam, seperti pengucapan salam, bahasa ikhwan/akhwat antara siswa, dan pemakaian baju koko dan jilbab.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diajukan sejumlah rekomendasi penelitian sebagai berikut:

Pertama, dalam rangka semakin meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Agama Islam di sekolah perlu disusun suatu buku

pedoman penyelenggaraan PAI yang dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang apa dan bagaimana pengembangan PAI dapat dilaksanakan secara efektif. Penyusunan buku pedoman ini didasarkan pada pengalaman yang telah teruji di lapangan, sehingga dalam perumusannya perlu melibatkan guru dan kepala sekolah yang telah berhasil menyelenggarakan PAI di sekolahnya masing-masing.

Kedua, untuk meningkatkan kreativitas dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan, perlu dilakukan kegiatan lomba karya tulis, puisi, kaligrafi, dan kesenian Islam untuk tingkat nasional yang dikemas dalam Pekan Pendidikan Islam Nasional, sehingga dapat merangsang sekolah-sekolah umum untuk semakin meningkatkan intensitas kegiatan keagamaan di sekolah. Pengalaman yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa perlombaan tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap keseriusan siswa dalam memperdalam agama melalui kegiatan ko-kurikuler.

Ketiga, karena pusat kegiatan keagamaan adalah mesjid, maka untuk perencanaan ke depan diperlukan adanya subsidi secara khusus yang dialokasikan dari pemerintah untuk pembangunan mesjid. Jumlah yang dialokasikan pemerintah perlu melihat visibilitas pembangunan mesjid yang direncanakan oleh sekolah. Cara pengucuran dana dapat dilakukan melalui Dana Bantuan Langsung (DBL) yang dikelola oleh Dewan Sekolah.

Keempat, untuk beberapa sekolah yang dianggap potensial dalam pengelolaan Pendidikan Agama Is-

lam (PAI) perlu diberi kesempatan untuk dijadikan sekolah teladan atau sekolah model PAI dengan stimulasi biaya yang diberikan secara bertahap sesuai dengan kinerja sekolah dan dievaluasi setiap kurun waktu satu tahun. Kalau ternyata sekolah tersebut memiliki kinerja yang baik, *block grant* (dana suntikan) dapat dikucurkan lagi, tetapi sebaliknya jika hal itu tidak sesuai dengan harapan, bantuan biaya tidak diberikan lagi.

Kelima, perlu dilakukan evaluasi tentang keefektifan program integrasi mata pelajaran umum dengan nilai-nilai imtaq yang telah diselenggarakan sejak tahun 1996 oleh Depdiknas, sebab ada sinyalemen bahwa jika kegiatan keagamaan sekolah cukup optimal dalam kegiatan ko-kurikuler cenderung hal tersebut dianggap kurang perlu.

Keenam, karena basis kegiatan keagamaan siswa berpusat di mesjid, maka penempatan sarana mesjid perlu diposisikan dengan tepat. Pada beberapa sekolah lokasi mesjid ditempatkan di dekat tempat lapangan olah raga, sehingga aktivitas siswa dalam kegiatan lainnya dapat dengan mudah dikontrol, terutama dalam melaksanakan kebiasaan menunaikan ibadah shalat.

Ketujuh, sumber bacaan dalam bentuk buku-buku agama yang tersedia di perpustakaan sekolah cenderung minus. Oleh karena itu, pengadaan buku yang bermuatan keagamaan perlu diperbanyak.

Kedelapan, untuk menyambut diberlakukannya proses pembelajaran agama di sekolah umum yang melibatkan para guru seagama seperti yang tercantum dalam pasal 12

UUSPN No. 20 tahun 2003, perlu dirumuskan batas-batas kewenangan guru agama dalam melakukan tugas-tugasnya dalam pendidikan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara siswa atau guru. Selain itu, penelitian lebih luas dalam mengidentifikasi kesiapan sekolah untuk menyambut diberlakukannya secara operasional pasal tersebut perlu dilakukan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sasaran penelitian akan lebih tepat dilakukan pada sekolah-sekolah yang sangat heterogen atau sekolah yang mayoritas siswanya non-muslim.

Kesembilan, karena latar belakang relijiusitas kepala sekolah cukup berperan dalam pengelolaan Pendidikan Agama Islam di sekolah, maka perlu diupayakan bahwa guru Agama Islam yang diangkat dengan NIP Depag untuk memiliki kesempatan yang sama dengan rekan-rekannya untuk dapat menjabat Kepala Sekolah. Untuk memecahkan persoalan itu, maka perlu dilakukan *fit and proper test* bagi seluruh guru yang memenuhi syarat sebagai kepala sekolah. Demikian pula seleksi kepala sekolah perlu dilakukan secara demokratis dengan melibatkan penilaian langsung dari guru.

Kesepuluh, untuk meningkatkan keakuratan dalam penilaian prestasi agama siswa perlu dipikirkan tentang sistem evaluasi keberhasilan siswa yang mencakup sikap dan nilai keagamaan. Hal ini penting untuk dikembangkan berkaitan dengan akan diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

pada tahun 2004 nanti. Untuk itu, secara praktis perlu dilakukan pengembangan sistem penilaian portofolio atau uji kompetensi untuk mata pelajaran agama yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan sekolah. Dalam format penilaian seperti laporan prestasi siswa, sebaiknya penjelasan tentang kekurangan dan kelebihan prestasi siswa dideskripsikan, sehingga informasi yang diperoleh orangtua siswa tidak hanya angka hasil penilaian kemampuan intelektual saja, tetapi mencakup aspek sikap dan nilai.

Kesebelas, untuk penelitian lebih lanjut, penelitian seperti ini dapat dilakukan pada sekolah-sekolah yang memiliki tingkat heterogenitas agama yang cukup seimbang. Hal ini penting dilakukan, karena ada kecenderungan bahwa dalam komunitas sekolah yang relatif heterogen intensitas pengembangan PAI lebih kurang terbuka. Dari penelitian seperti itu diharapkan dapat dirumuskan format pengelolaan pendidikan agama (bukan hanya Islam) yang lebih menjamin tidak terjadinya konflik horizontal antar guru atau antar siswa.

Terakhir, untuk memperluas kesempatan dalam melakukan pengembangan PAI melalui program desiminasi program, perlu dilakukan jaringan kerjasama antar sekolah yang telah unggul dengan yang masih dalam perintisan pengelolaan PAI. Melalui kerjasama seperti itu, apa yang telah berhasil dilaksanakan oleh sekolah tertentu dapat ditularkan ke sekolah lainnya sehingga proses penyebaran inovasi pendidikan agama dapat berjalan cepat. Secara teknis kerjasama ini

dapat dijalin dengan mengefektifkan forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI). Sedangkan nomenklatur kerjasama dapat dikemas dalam istilah Sekolah Mitra seperti yang tengah digagas Puslitbang saat ini.

Daftar Pustaka

- Fattah, N. (2000). *Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi Pemberdayaan Sekolah dalam Rangka Peningkatan Mutu dan Kemandirian Sekolah*, Bandung: Andira.
- Jalal F. & Supriadi D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Karnati, N. dkk. (2001). *Manajemen Sarana & Prasarana Madrasah Mandiri*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Lipham, J.M. (1985). *The Principalship: Concepts, Competencies, and Cases*. New York: Longman Inc.
- Mohrman, S.A et al. 1993. *School Based Management: Organizing for High Performance*, San Fransisco: Jossey. Bass Publishers.
- Mulyana, R. (2003). *Pengembangan Kepribadian dan Kesadaran Beragama*. Bandung: PPS UPI.
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sallis, E. (1993). *Total Quality Management in Education*, London: Kogan Page Limited.
- Tafsir, A. (2001). *Teori-teori Pendidikan Islam*. Bandung: Fakultas Tarbiyah IAIN SGD.
- Tilaar, H.A.R. (2000). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia
- Zainuddin, dkk. (1991). *Seluk Beluk Pemikiran al-Ghazali tentang Pendidikan*. Cv. Dipenogoro: Bandung